

ANALISIS KAPASITAS LAHAN DAN BANGUNAN TERHADAP DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Muhammad Fakhron Noviansyah*, Agus Timan, Raden Bambang Sumarsono

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author, email: fakhronnoviasyah@gmail.com

doi: 10.17977/um065.v4.i11.2024.12

Kata kunci

Kapasitas
lahan dan bangunan
daya tampung peserta didik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ukuran lahan sekolah; (2) ukuran bangunan sekolah; (3) jumlah peserta didik; dan (4) kapasitas lahan dan bangunan sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kota Malang. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan model penelitian non-eksperimen, yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi serta datang langsung ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan data yang kurang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: (1) Total luas lahan sekolah dasar negeri di Kota Malang adalah 53.736m² dan total luas lahan sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang adalah 18.008m²; (2) Total luas bangunan sekolah dasar negeri di Kota Malang adalah 55.569m² dan total luas bangunan sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang adalah 23.637m²; (3) Total jumlah peserta didik sekolah dasar negeri di Kota Malang adalah 28.016 peserta didik dan total jumlah peserta didik sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang adalah 11.743 peserta didik; dan (4) kapasitas lahan dan bangunan terhadap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di Kota Malang.

1. Pendahuluan

Pendidikan direncanakan oleh pemerintah semata-mata untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui pendidikan, masyarakat akan diberikan keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas dalam proses pembelajaran. Guna mewujudkan tujuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Sejalan dengan hal itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Semua fasilitas di sekolah yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran disebut sarana pendidikan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sedangkan fasilitas yang tidak digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran disebut prasarana pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Bab 1 dinyatakan jenjang pendidikan dasar harus memiliki kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan. Adapun kriteria minimum sarana yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah yaitu perabot, peralatan dan media pendidikan, teknologi informasi, serta perlengkapan lainnya yang menunjang proses belajar mengajar. Untuk kriteria minimum prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah yaitu: lahan, bangunan, dan instalasi daya. Lahan adalah tempat atau tanah untuk didirikan bangunan yang digunakan untuk proses kegiatan pendidikan,

halaman atau lahan terbuka harus dimiliki oleh setiap sekolah dan harus sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut, halaman atau lahan terbuka tersebut digunakan untuk tempat pembelajaran luar ruangan seperti olahraga dan juga bisa digunakan untuk tempat bermain, istirahat bagi peserta didik di luar ruangan dan juga sebagai sarana untuk bersosialisasi antar peserta didik (Bafadal, 2014:4). Lahan yang ada di sekolah memiliki rasio minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah, yaitu: Lahan tersebut meliputi tempat bermain/berolahraga dengan beberapa fungsinya, untuk luas tempat bermain/berolahraga memiliki rasio minimum 3 m²/siswa, terdapat tempat berolahraga dengan ukuran 20 m x 15 m untuk jenjang SD dan 30 m x 20 m untuk jenjang SMP, ditanami pohon penghijauan di sebagian tempatnya, letaknya berada jauh dari ruang kelas, fungsi tempat bermain/berolahraga tidak untuk tempat parkir. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga membahas tentang ketentuan mengenai ruang kelas untuk jenjang SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP/MTS (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) yaitu ruang kelas digunakan sebagai tempat belajar mengajar yang membutuhkan media sederhana, jumlah ruang kelas disesuaikan dengan banyak rombongan belajar, jumlah maksimum satu kelas adalah 28 siswa untuk SD dan 32 siswa untuk SMP, luas ruang kelas dengan rasio 2 m²/siswa, ruang kelas diharuskan memiliki pencahayaan yang baik dan memiliki pintu yang memadai agar siswa dan guru mudah keluar jika terjadi bahaya.

Berdasarkan hasil studi lapangan yang peneliti lakukan di beberapa sekolah pada jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang, masih ada yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang terjadi di beberapa sekolah di Kota Malang yang menampung hingga lebih 28 peserta didik untuk jenjang sekolah dasar negeri dan 34 peserta didik untuk sekolah menengah pertama negeri tiap rombongan belajarnya tanpa memandang kesejahteraan peserta didik untuk menerima pendidikan, peserta didik memiliki luas area atau space 2m² tiap peserta didik untuk di dalam ruang atau dalam bangunan dan 3m² tiap peserta didik untuk di luar ruang atau area bermain/berolahraga.

Beberapa sekolah di Kota Malang memang sudah mempunyai lapangan untuk area bermain, berolahraga ataupun upacara bendera. Tetapi lahan tersebut masih belum sesuai dengan jumlah peserta didik yang banyak. Tanah yang dimiliki sekolah untuk memenuhi standar sangat kecil atau sedikit. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memenuhi standar yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah, agar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan bisa berjalan efektif dan efisien tanpa terganggu dengan jumlah peserta didik yang terlalu banyak sedangkan lahan yang dimiliki oleh sekolah kurang memadai untuk menampung jumlah peserta didiknya. Memenuhi standar pendidikan juga bisa membuat kesejahteraan antar peserta didik atau pendidik bisa lebih baik dan nyaman dalam menjalankan kegiatan pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Penelitian ini dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri) di Kota Malang, dengan alasan karena sekolah negeri merupakan sekolah yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan sebagai acuan atau contoh dari sekolah swasta lainnya. Kota Malang memiliki 195 sekolah dasar negeri dan 27 sekolah menengah pertama negeri, yang berada pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Sukun.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan model penelitian non-eksperimen, yaitu penelitian deskriptif dimana peneliti mengumpulkan data atau fakta mengenai kapasitas lahan dan bangunan terhadap daya tampung peserta didik pada jenjang pendidikan dasar pada saat melakukan penelitian, kemudian data tersebut diolah serta dianalisis dan dideskripsikan. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah luas lahan terbuka, jumlah luas bangunan dan jumlah peserta didik. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang pada jenjang pendidikan dasar. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen non-tes, yang berupa dokumentasi. Dokumen tersebut meliputi luas lahan, luas bangunan dan jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah dasar negeri yang berjumlah 195 sekolah dan sekolah menengah pertama yang berjumlah 27 sekolah di Kota Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik probability sampling dengan menggunakan proporsional simple random sampling dengan cara

mengambil 50% sampel dari seluruh jumlah populasi. Sampel diambil 50% dengan cara mengundi nama-nama sekolah yang ditulis di kertas kecil dan dibedakan tiap kecamatan, kemudian diambil secara acak kertas tersebut untuk dijadikan sampel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini yaitu data luas lahan dan luas bangunan yang dikumpulkan peneliti dengan cara datang langsung ke sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk mendapatkan data yang kurang. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu dokumen luas lahan dan jumlah peserta didik yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang di dalamnya terdapat distribusi frekuensi berupa persentase. Analisis data dilakukan pada aplikasi microsoft excel, peneliti membuat tabel yang di dalamnya terdapat total luas lahan, luas bangunan dan jumlah peserta didik di Kota Malang. Tabel tersebut kemudian dibuat diagram batang untuk mengetahui tingkat perbedaan luas lahan dan luas bangunan serta jumlah peserta didik dari lima kecamatan di Kota Malang. Sehingga dapat diketahui kecamatan mana yang memiliki lahan dan bangunan yang terluas serta memiliki peserta didik terbanyak di Kota Malang. Pada penelitian ini kriteria penarikan kesimpulan yaitu peneliti dapat mengetahui jumlah ukuran luas lahan, jumlah ukuran luas bangunan ruang, dan jumlah peserta didik. Jumlah ukuran luas lahan dan jumlah ukuran luas bangunan dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang ada di sekolah, dengan jarak space 3m² tiap anak yang berada di luar ruangan dan jarak space 2m² tiap peserta didik yang berada di dalam bangunan. Kemudian perbandingan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007. Hasil perbandingan tersebut terdapat dalam tabel yang kemudian dibuat diagram batang serta terdapat persentase untuk mengetahui kapasitas lahan dan bangunan terhadap daya tampung peserta didik jenjang pendidikan dasar di Kota Malang apakah telah sesuai standar. Dalam perhitungan untuk mencari kesesuaian daya tampung dibutuhkan data-data tersebut yang mana hasil pengukuran tersebut berupa persentase yang mempunyai pengertian yaitu persentase dari kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh sekolah di lima kecamatan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kemampuan daya tampung peserta didik terhadap kapasitas lahan dan bangunan pada jenjang pendidikan dasar sebagai berikut.

$$Dt = \frac{L}{Kb} \times 100\%$$

Keterangan:

Dt = kemampuan daya tampung peserta didik terhadap kapasitas lahan dan bangunan sekolah

L = jumlah luas lahan atau bangunan yang dimiliki sekolah

Kb = jumlah kebutuhan minimal luas lahan atau bangunan di sekolah

Kriteria yang dibuat untuk menafsirkan hasil analisis data yaitu dibuat dalam tiga kriteria. Jika hasil persentase kemampuan daya tampung peserta didik terhadap kapasitas lahan dan bangunan pada jenjang pendidikan dasar kurang dari 100% (<100%) dinyatakan tidak sesuai, jika sama dengan 100% (=100) dinyatakan sesuai dan jika lebih dari 100% (>100%) dinyatakan sangat sesuai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

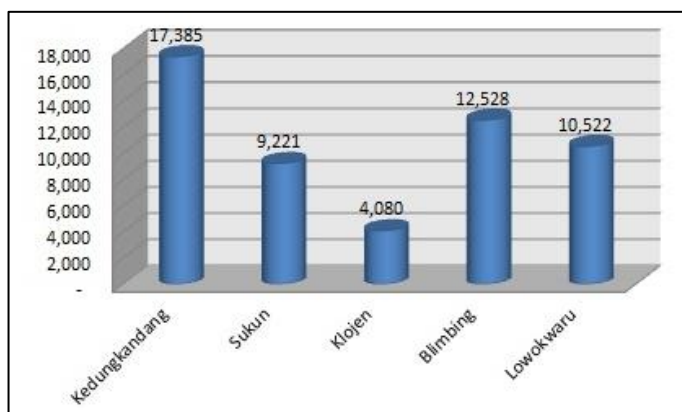
3.1.1. Ukuran Luas Lahan Sekolah Dasar Negeri

Ukuran luas lahan sekolah dasar merupakan bidang tanah yang tidak didirikan bangunan atau halaman yang dipergunakan peserta didik untuk bermain, berolahraga dan melaksanakan kegiatan pendidikan lainnya. Berikut merupakan tabel ukuran luas lahan sekolah dasar negeri tiap kecamatan.

Tabel 1 Ukuran Luas Lahan Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan Sekolah Dasar Negeri (m ²)
Kedungkandang	17.385
Sukun	9.221
Klojen	4.080
Blimbing	12.528
Lowokwaru	10.522
Total	53.736

Berdasarkan Tabel 1 total luas lahan sekolah dasar negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 53.736m². Selain dalam bentuk tabel, total luas lahan sekolah dasar negeri akan disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan bentuk diagram luas lahan sekolah dasar negeri tiap kecamatan.



Gambar 1 Diagram Luas Lahan Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 menjelaskan bahwa luas lahan terbesar dimiliki oleh sekolah dasar negeri di Kecamatan Kedungkandang sebesar 17.385m². Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Kedungkandang sebesar 17.385m² dan hasil terkecil pada Kecamatan Klojen sebesar 4.080m².

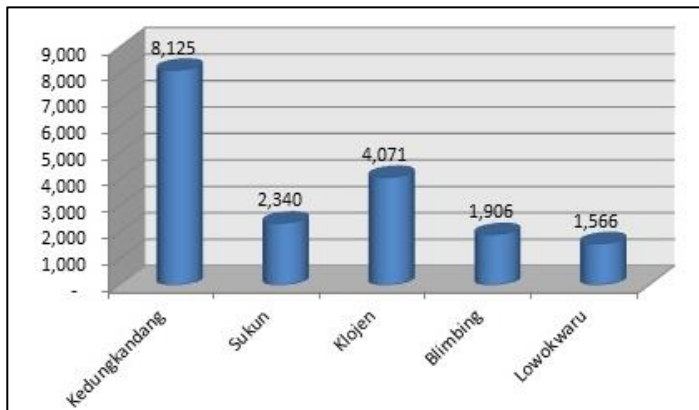
3.1.2. Ukuran Luas Lahan Sekolah Menengah Pertama Negeri

Ukuran luas lahan sekolah menengah pertama merupakan bidang tanah yang tidak didirikan bangunan atau halaman yang dipergunakan peserta didik untuk bermain, berolahraga dan melaksanakan kegiatan pendidikan lainnya. Berikut merupakan tabel ukuran luas lahan sekolah menengah pertama negeri tiap kecamatan.

Tabel 2 Ukuran Luas Lahan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiap Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan Sekolah Menengah Pertama Negeri (m ²)
Kedungkandang	8.125
Sukun	2.340
Klojen	4.071
Blimbing	1.906
Lowokwaru	1.566
Total	18.008

Berdasarkan Tabel 2 total luas lahan sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 18.008m². Selain dalam bentuk tabel, total luas lahan sekolah menengah pertama negeri akan disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan bentuk diagram luas lahan sekolah menengah pertama negeri tiap kecamatan.



Gambar 2 Diagram Luas Lahan Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 2 menjelaskan bahwa luas lahan terbesar dimiliki oleh sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Kedungkandang sebesar 8.125m².

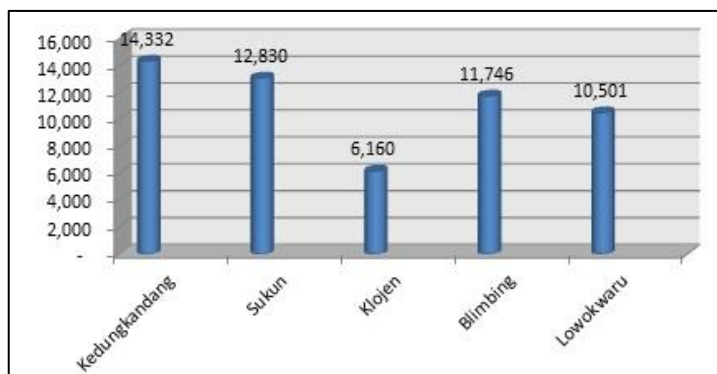
3.1.3. Ukuran Luas Bangunan Sekolah Dasar Negeri

Ukuran luas bangunan sekolah dasar merupakan bidang tanah yang didirikan bangunan yang dipergunakan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Berikut merupakan tabel ukuran luas bangunan sekolah dasar negeri tiap kecamatan.

Tabel 3 Ukuran Luas Bangunan Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Kecamatan	Luas Bangunan Sekolah Dasar Negeri (m ²)
Kedungkandang	14.332
Sukun	12.830
Klojen	6.160
Blimbing	11.746
Lowokwaru	10.501
Total	55.569

Berdasarkan Tabel 3 total luas bangunan sekolah dasar negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 55.569m². Selain dalam bentuk tabel, total luas bangunan sekolah dasar negeri akan disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan bentuk diagram luas lahan sekolah dasar negeri tiap kecamatan.



Gambar 3 Diagram Luas Bangunan Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 3 menjelaskan bahwa luas bangunan terbesar dimiliki oleh sekolah dasar negeri di Kecamatan Kedungkandang sebesar 14.332m².

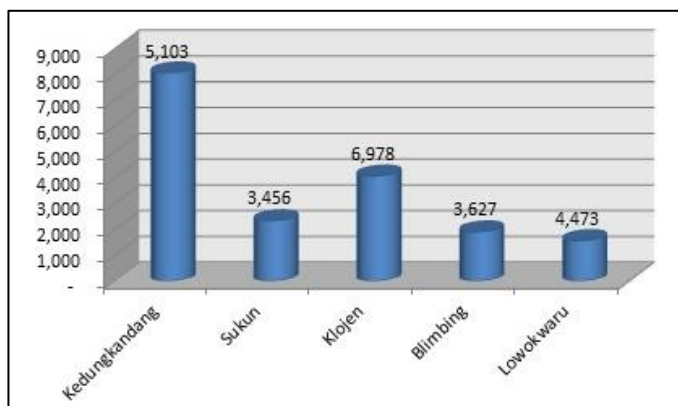
3.1.4. Ukuran Luas Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri

Ukuran luas bangunan sekolah menengah pertama merupakan bidang tanah yang didirikan bangunan yang dipergunakan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Berikut merupakan tabel ukuran luas bangunan sekolah menengah pertama negeri tiap kecamatan.

Tabel 4 Ukuran Luas Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiap Kecamatan

Kecamatan	Luas Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (m ²)
Kedungkandang	5.103
Sukun	3.456
Klojen	6.978
Blimbing	3.627
Lowokwaru	4.473
Total	23.637

Berdasarkan Tabel 4 total luas bangunan sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 23.637m². Selain dalam bentuk tabel, total luas bangunan sekolah menengah pertama negeri akan disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan bentuk diagram luas bangunan sekolah menengah pertama negeri tiap kecamatan.



Gambar 4 Diagram Luas Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiap Kecamatan

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4 menjelaskan bahwa luas bangunan terbesar dimiliki oleh sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Klojen sebesar 6.978m².

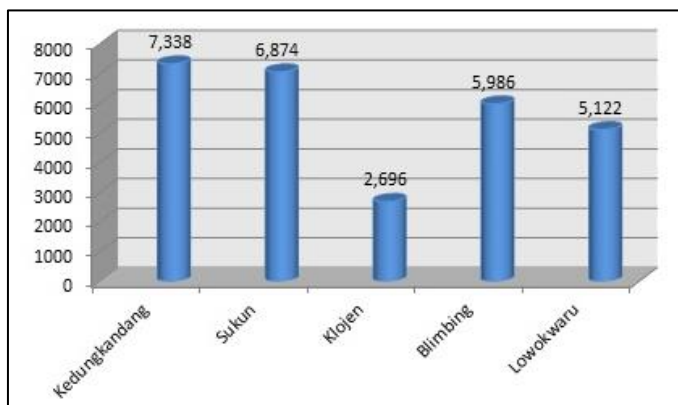
3.1.5. Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri

Jumlah peserta didik sekolah dasar merupakan total seluruh peserta didik mulai kelas satu sampai kelas enam yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di satuan pendidikan atau sekolah. Berikut merupakan tabel jumlah peserta didik sekolah dasar negeri tiap kecamatan.

Tabel 5 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri (m ²)
Kedungkandang	7.338
Sukun	6.874
Klojen	2.696
Blimbing	5.986
Lowokwaru	5.122
Total	28.016

Berdasarkan Tabel 5 total peserta didik sekolah dasar negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 28.016 peserta didik. Selain dalam bentuk tabel, total peserta didik sekolah dasar negeri akan disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan bentuk diagram jumlah peserta didik sekolah dasar negeri tiap kecamatan.



Gambar 5 Diagram Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Tiap Kecamatan

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 5 menjelaskan bahwa jumlah peserta didik terbesar dimiliki oleh sekolah dasar negeri di Kecamatan Kedungkandang sebesar 7.338 peserta didik.

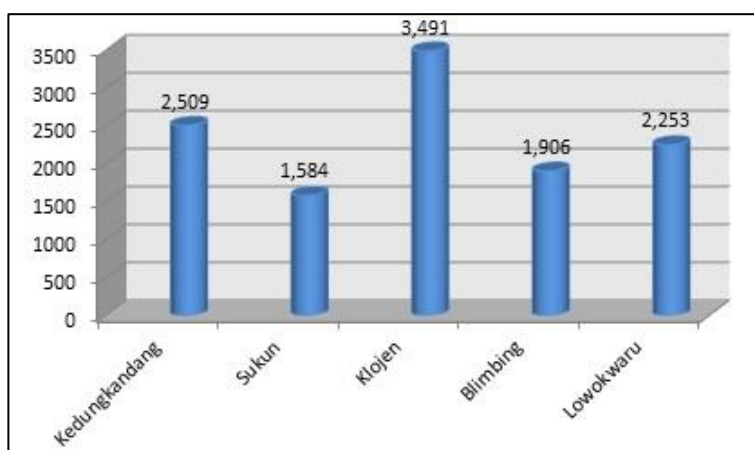
3.1.6. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri

Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama merupakan total seluruh peserta didik mulai kelas satu sampai kelas tiga yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di satuan pendidikan atau sekolah. Berikut merupakan tabel jumlah peserta didik sekolah menengah pertama tiap kecamatan.

Tabel 6 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri (m2)
Kedungkandang	2.509
Sukun	1.584
Klojen	3.491
Blimbing	1.906
Lowokwaru	2.253
Total	11.743

Berdasarkan Tabel 6 total peserta didik sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 11.743 peserta didik. Selain dalam bentuk tabel, total peserta didik sekolah menengah pertama negeri akan disajikan dalam bentuk diagram. Berikut merupakan bentuk diagram jumlah peserta didik sekolah menengah pertama negeri tiap kecamatan.



Gambar 6 Diagram Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiap Kecamatan

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 6 menjelaskan bahwa jumlah peserta didik terbesar dimiliki oleh sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Klojen sebesar 3.491 peserta didik.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Luas Lahan Sekolah Dasar Negeri

Luas lahan sekolah dasar negeri di Kota Malang berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui total luas lahan dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar 17.385m² dengan jumlah 23 sekolah, Kecamatan Sukun sebesar 9.221m² dengan jumlah 21 sekolah, Kecamatan Klojen sebesar 4.080m² dengan jumlah 10 sekolah, Kecamatan Blimbing sebesar 12.528m² dengan jumlah 22 sekolah dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 10.522m² dengan jumlah 23 sekolah. Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Kedungkandang sebesar 17.385m² dan hasil terkecil pada Kecamatan Klojen sebesar 4.080m². Total seluruh luas lahan sekolah dasar negeri dari lima kecamatan tersebut sebesar 53.736m² dengan jumlah 99 sekolah. Luas lahan tersebut dapat diketahui dengan menggunakan pedoman berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007, bahwa luas lahan adalah sebidang tanah yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa lahan pertamanan, lahan praktik dan lahan untuk prasarana penunjang atau tempat bermain dan berolahraga yang mempunyai ketentuan rasio minimum luas tepat bermain/berolahraga 3m²/siswa. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Busono (2011:86), bahwa evaluasi luas lahan yang dimiliki sekolah dasar dilakukan dengan mengukur lahan yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu lahan untuk bangunan, lahan untuk lapangan olahraga/upacara dan lahan untuk ruang terbuka hijau (taman).

3.2.2. Luas Lahan Sekolah Menengah Pertama Negeri

Luas lahan sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui total luas lahan dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar 8.125m² dengan jumlah 23 sekolah, Kecamatan Sukun sebesar 2.340m² dengan jumlah 21 sekolah, Kecamatan Klojen sebesar 4.071m² dengan jumlah 10 sekolah, Kecamatan Blimbing sebesar 1.906m² dengan jumlah 22 sekolah dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 1.566m² dengan jumlah 23 sekolah. Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Kedungkandang sebesar 8.125m² dan hasil terkecil pada Kecamatan Lowokwaru sebesar 1.566m². Total seluruh luas lahan sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan tersebut sebesar 18.008m² dengan jumlah 14 sekolah. Luas lahan tersebut dapat diketahui dengan menggunakan pedoman berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007, bahwa luas lahan adalah sebidang tanah yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa lahan pertamanan, lahan praktik dan lahan untuk prasarana penunjang atau tempat bermain dan berolahraga yang mempunyai ketentuan rasio minimum luas tepat bermain/berolahraga 3m²/siswa. Menurut Musa (2012) aset fisik pendidikan terdiri dari tanah, bangunan dan perlengkapan serta mencakup fasilitas fisik untuk pembelajaran dan ruang tambahan.

3.2.3. Luas Bangunan Sekolah Dasar Negeri

Luas bangunan sekolah dasar negeri di Kota Malang berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui total luas bangunan dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar 14.332m² dengan jumlah 23 sekolah, Kecamatan Sukun sebesar 12.830m² dengan jumlah 21 sekolah, Kecamatan Klojen sebesar 6.160m² dengan jumlah 10 sekolah, Kecamatan Blimbing sebesar 11.746m² dengan jumlah 22 sekolah dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 10.501m² dengan jumlah 23 sekolah. Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Kedungkandang sebesar 14.332m² dan hasil terkecil pada Kecamatan Klojen sebesar 6.160m². Total seluruh luas bangunan sekolah dasar negeri dari lima kecamatan tersebut sebesar 55.569m² dengan jumlah 99 sekolah. Bangunan sekolah adalah sebidang tanah yang di atasnya didirikan bangunan/gedung untuk proses pembelajaran. Luas bangunan sekolah dapat diketahui dengan mengukur luas ruang-ruang yang ada di sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sesuai dengan pengertian menurut Bafadal (2014:4) yang menyatakan bahwa ruang kelas atau ruang belajar adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar baik teori maupun praktik. Pengukuran luas bangunan juga menggunakan rasio minimum luas ruang kelas yaitu 2m²/siswa berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

3.2.4. Luas Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri

Luas bangunan sekolah menengah pertama negeri di Kota Malang berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui total luas bangunan dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar 5.103m² dengan jumlah 23 sekolah, Kecamatan Sukun sebesar 3.456m² dengan jumlah 21 sekolah, Kecamatan Klojen sebesar 6.978m² dengan jumlah 10 sekolah, Kecamatan Blimbing sebesar 3.627m² dengan jumlah 22 sekolah dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 4.473m² dengan jumlah 23 sekolah. Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Klojen sebesar 6.978m² dan hasil terkecil pada Kecamatan Sukun sebesar 3.456m². Total seluruh luas bangunan sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan tersebut sebesar 23.637m² dengan jumlah 14 sekolah. Pengukuran luas bangunan menggunakan rasio minimum luas ruang kelas yaitu 2m²/siswa berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Bangunan di sekolah dalam hal ini masuk ke dalam jenis prasarana pendidikan. Hal ini sesuai pendapat Suryosubroto (2004:75) bahwa prasarana pendidikan adalah barang atau benda yang tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, contoh bangunan gedung. Prasarana pendidikan menurut Sanjaya (2010:18) adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan serta prasarana lebih dahulu ada sebelum sarana pendidikan disediakan atau digunakan.

3.2.5. Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui total jumlah peserta didik sekolah dasar negeri dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar 7.338 peserta didik dengan jumlah 23 sekolah, Kecamatan Sukun sebesar 6.874 peserta didik dengan jumlah 21 sekolah, Kecamatan Klojen sebesar 2.696 peserta didik dengan jumlah 10 sekolah, Kecamatan Blimbing sebesar 5.986 peserta didik dengan jumlah 22 sekolah dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 5.122 peserta didik dengan jumlah 23 sekolah. Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Kedungkandang sebesar 7.338 peserta didik dan hasil terkecil pada Kecamatan Klojen sebesar 2.696 peserta didik. Total seluruh jumlah peserta didik sekolah dasar negeri dari lima kecamatan tersebut sebesar 28.016m² dengan jumlah 99 sekolah. Peserta didik adalah individu yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 siswa (Permendiknas No. 24 Tahun 2007). Perhitungan kebutuhan ruang belajar tergantung dari jumlah tambahan siswa, jumlah rata-rata murid untuk setiap rombongan belajar/kelas dan efisiensi penggunaan ruang belajar (shift) (Yudi, 2012:4).

3.2.6. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui total jumlah peserta didik sekolah menengah pertama negeri dari masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang sebesar 2.509 peserta didik dengan jumlah 23 sekolah, Kecamatan Sukun sebesar 1.584 peserta didik dengan jumlah 21 sekolah, Kecamatan Klojen sebesar 3.491 peserta didik dengan jumlah 10 sekolah, Kecamatan Blimbing sebesar 1.906 peserta didik dengan jumlah 22 sekolah dan Kecamatan Lowokwaru sebesar 2.253 peserta didik dengan jumlah 23 sekolah. Dari lima kecamatan tersebut diperoleh hasil terbesar pada Kecamatan Klojen sebesar 3.491 peserta didik dan hasil terkecil pada Kecamatan Sukun sebesar 1.584 peserta didik. Total seluruh jumlah peserta didik sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan tersebut sebesar 11.743 peserta didik dengan jumlah 14 sekolah. Menurut hasil penelitian Gewab dkk (2015:49), jumlah usia sekolah atau peserta didik di masing-masing kecamatan mempengaruhi dalam menentukan rombongan belajar yang akan disediakan di suatu kecamatan. Dari hasil itu didapat jumlah rombongan belajar maksimal yang menjadi acuan dalam penyediaan fasilitas pendidikan SLTP di masing-masing kecamatan.

3.2.7. Kesesuaian Kapasitas Lahan terhadap Daya Tampung Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian kapasitas lahan pada sekolah dasar negeri, dapat diketahui pada Kecamatan Kedungkandang terdapat 5 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 18 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 23 sekolah dasar negeri di Kecamatan Kedungkandang terdapat 21.7% sekolah yang memiliki luas lahan lebih dan terdapat 78.3% sekolah yang memiliki kekurangan lahan.

Pada Kecamatan Sukun terdapat 1 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 20 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 21 sekolah dasar negeri di Kecamatan Sukun terdapat 4.8% sekolah yang memiliki luas lahan lebih dan terdapat 95.2% sekolah yang memiliki kekurangan lahan. Pada Kecamatan Klojen terdapat 2 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 8 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 10 sekolah dasar negeri di Kecamatan Klojen terdapat 20% sekolah yang memiliki luas lahan lebih dan terdapat 80% sekolah yang memiliki kekurangan lahan.

Pada Kecamatan Blimbing terdapat 5 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 17 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 22 sekolah dasar negeri di Kecamatan Blimbing terdapat 22.7% sekolah yang memiliki luas lahan lebih dan terdapat 77.3% sekolah yang memiliki kekurangan lahan. Pada Kecamatan Lowokwaru terdapat 2 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 21 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 23 sekolah dasar negeri di Kecamatan Lowokwaru terdapat 8.7% sekolah yang memiliki luas lahan lebih dan terdapat 91.3% sekolah yang memiliki kekurangan lahan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian lahan pada sekolah menengah pertama negeri, dapat diketahui pada Kecamatan Kedungkandang terdapat 1 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 2 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 3 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Kedungkandang terdapat 33.3% sekolah yang memiliki luas lahan lebih dan terdapat 66.7% sekolah yang memiliki kekurangan lahan.

Pada Kecamatan Sukun tidak terdapat sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 2 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 2 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Sukun terdapat 100% sekolah yang memiliki kekurangan lahan. Pada Kecamatan Klojen tidak terdapat sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 4 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 4 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Klojen terdapat 100% sekolah yang memiliki kekurangan lahan.

Pada Kecamatan Blimbing tidak terdapat sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 2 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 2 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Blimbing terdapat 100% sekolah yang memiliki kekurangan lahan. Pada Kecamatan Lowokwaru tidak terdapat sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan lahan, 3 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan lahan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau

memiliki luas lahan sama dengan luas minimumnya. Dari 3 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Lowokwaru terdapat 100% sekolah yang memiliki kekurangan lahan.

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, kapasitas lahan terhadap daya tampung peserta didik pada jenjang pendidikan dasar di Kota Malang lebih besar masuk dalam kategori tidak sesuai atau kekurangan lahan. Hal tersebut terjadi karena luas lahan yang dimiliki sekolah tidak sesuai dengan luas lahan yang seharusnya dimiliki sekolah dengan perhitungan $3m^2$ / peserta didik yang telah diatur dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Seperti dalam penelitian Nofirman dkk (2016), bahwa terdapat fasilitas pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sungai Penuh yang mana daya tampungnya tidak tertampung dari perhitungan standar dikarenakan status fasilitasnya diunggulkan serta terdapat sekolah dasar yang bersebelahan namun berbeda kelurahan dan masyarakat dari luar kelurahan memilih sekolah dasar yang terdekat dengan rumah yang menyebabkan jumlah peserta didik terlalu banyak pada salah satu sekolah dasar tersebut. Sedangkan daya tampung di tingkat sekolah menengah pertama yang melebihi dari hitungan standar disebabkan oleh banyaknya orangtua yang ingin anaknya bersekolah di sekolah favorit, selain itu terdapat peserta didik dari kecamatan lain yang bersekolah di sekolah menengah pertama Kecamatan Sungai Penuh. Dalam penelitian lain yang dilakukan Annisa dkk (2016) di Kota Tarakan pada tingkat sekolah dasar negeri terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu terletak pada tersedianya sarana dan prasarana di masing-masing sekolah, baik dari luas lahan maupun luas bangunan yang memiliki perbedaan pada masing-masing sekolah di Kota Tarakan.

3.2.8. Kesesuaian Kapasitas Bangunan terhadap Daya Tampung Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian kapasitas bangunan pada sekolah dasar negeri, dapat diketahui pada Kecamatan Kedungkandang terdapat 16 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 7 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 23 sekolah dasar negeri di Kecamatan Kedungkandang terdapat 69.6% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 30.4% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan.

Pada Kecamatan Sukun terdapat 4 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 17 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 21 sekolah dasar negeri di Kecamatan Sukun terdapat 19% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 81% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan. Pada Kecamatan Klojen terdapat 7 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 3 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 10 sekolah dasar negeri di Kecamatan Klojen terdapat 70% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 30% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan.

Pada Kecamatan Blimbing terdapat 9 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 13 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 22 sekolah dasar negeri di Kecamatan Blimbing terdapat 40.9% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 59.1% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan. Pada Kecamatan Lowokwaru terdapat 13 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 10 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 23 sekolah dasar negeri di Kecamatan Lowokwaru terdapat 56.5% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 43.5% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian kapasitas bangunan pada sekolah menengah pertama negeri, dapat diketahui pada Kecamatan Kedungkandang terdapat 3 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, tidak terdapat sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 3 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Kedungkandang terdapat 100% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih.

Pada Kecamatan Sukun terdapat 2 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, tidak terdapat sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 2 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Sukun terdapat 100% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih. Pada Kecamatan Klojen terdapat 3 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 1 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 4 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Klojen terdapat 75% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 25% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan.

Pada Kecamatan Blimbing terdapat 11 sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 1 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan tidak terdapat sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 2 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Blimbing terdapat 50% sekolah yang memiliki luas bangunan lebih dan terdapat 50% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan. Pada Kecamatan Lowokwaru tidak terdapat sekolah dalam kategori sangat sesuai atau yang memiliki kelebihan luas bangunan, 1 sekolah dalam kategori tidak sesuai atau yang memiliki kekurangan luas bangunan dan terdapat 2 sekolah dalam kategori sesuai atau memiliki luas bangunan sama dengan luas minimumnya. Dari 3 sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Lowokwaru terdapat 66.7% sekolah yang memiliki luas bangunan sesuai luas minimum dan terdapat 33.3% sekolah yang memiliki kekurangan luas bangunan.

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, kapasitas bangunan terhadap daya tampung peserta didik pada sekolah dasar negeri di Kota Malang sebagian besar masuk dalam kategori tidak sesuai atau kekurangan luas lahan. Hal tersebut dikarenakan luas bangunan yang dimiliki sekolah tidak sesuai dengan luas bangunan yang seharusnya yaitu jarak 2m tiap peserta didik dalam ruang kelas sesuai dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Dalam penelitian yang dilakukan Nofirman dkk (2016) di Kecamatan Sungai Penuh juga terjadi pemanfaatan ruang kelas yang tidak ideal yang disebabkan oleh jumlah peserta didik yang terlalu banyak di dalam kelas atau dengan kata lain melebihi aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk kapasitas bangunan terhadap daya tampung peserta didik pada sekolah menengah negeri di Kota Malang sebagian besar telah sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 bahwa jarak tiap peserta didik 2m.

4. Simpulan

Total luas lahan sekolah dasar negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 53.736m², luas lahan terbesar dimiliki oleh Kecamatan Kedungkandang sebesar 17.385m² dan luas lahan terkecil dimiliki oleh Kecamatan Klojen 4.080m². Total luas lahan sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 18.008m², luas lahan terbesar dimiliki oleh Kecamatan Kedungkandang sebesar 8.125m² dan luas lahan terkecil dimiliki oleh Kecamatan Lowokwaru 1.556m². Total luas bangunan sekolah dasar negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 55.569m², luas bangunan terbesar dimiliki oleh Kecamatan Kedungkandang sebesar 14.332m² dan luas bangunan terkecil dimiliki oleh Kecamatan Klojen 6.160m². Total luas bangunan sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 23.637m², luas bangunan terbesar dimiliki oleh Kecamatan Klojen sebesar 6.978m² dan luas bangunan terkecil dimiliki oleh Kecamatan Sukun 3.456m². Total jumlah peserta didik sekolah dasar negeri dari lima kecamatan di Kota Malang adalah 28.016 peserta didik, jumlah peserta didik terbesar dimiliki oleh Kecamatan Kedungkandang sebesar 7.338 peserta didik dan jumlah peserta didik terkecil dimiliki oleh Kecamatan Klojen 2.696. Total jumlah peserta didik sekolah menengah pertama negeri dari lima kecamatan peserta didik di Kota Malang adalah 11.743 peserta didik, jumlah peserta didik terbesar

dimiliki oleh Kecamatan Klojen sebesar 3.491 peserta didik dan jumlah peserta didik terkecil dimiliki oleh Kecamatan Sukun 1584 peserta didik.

Kesesuaian kapasitas lahan dan bangunan terhadap daya tampung peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Untuk kapasitas lahan dari 99 sekolah dasar negeri terdapat 15 sekolah yang memiliki presentase >100% atau dalam kategori sangat sesuai, terdapat 84 sekolah yang memiliki presentase <100% atau dalam kategori tidak sesuai. Dari 14 sekolah menengah pertama negeri terdapat 1 sekolah yang memiliki presentase >100% atau dalam kategori sangat sesuai, terdapat 13 sekolah yang memiliki presentase <100% atau dalam kategori tidak sesuai. Untuk Kapasitas bangunan dari 99 sekolah dasar negeri terdapat 49 sekolah yang memiliki presentase >100% atau dalam kategori sangat sesuai, terdapat 50 sekolah yang memiliki presentase <100% atau dalam kategori tidak sesuai. Dari 14 sekolah menengah pertama negeri terdapat 9 sekolah yang memiliki presentase >100% atau dalam kategori sangat sesuai, terdapat 3 sekolah yang memiliki presentase <100% atau dalam kategori tidak sesuai dan terdapat 2 sekolah yang memiliki presentase =100% atau dalam kategori sesuai.

Daftar Rujukan

- Annisa, M, dkk. 2016. Analisis Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Berdasarkan Tingkat Akreditasi di Kota Tarakan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 840-853. DOI: 10.23887/jpi.undiskha.v5i2.8934.
- Bafadal, I. 2014. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Busono, T. 2011. Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kota Bandung. *Invotec*, VII(1), 81-91. Dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/invotec/article/download/6079>.
- Gewab, dkk. 2015. Analisis Kebutuhan dan Sebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Tambrauw. *Spasial: Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(3), 112-334. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/9976>.
- Musa, M.F & Zarita, A. 2012. Higher educational physical assets and facilities. *Journal of Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 50, 472-478. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.08.051.
- Nofirman, dkk. 2016. Kajian Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Sungai Penuh. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University*, 2(3). Dari <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sanjaya, W. 2010. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yudi, A.A. 2012. Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau dari Segi Sarana dan Prasarana (Sarana dan Prasarana PPLP). *Jurnal Cerdas Sifa*, 1(1), 1-8. Dari <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/csp/article/view/702>.

